

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Abbas, Syahrial, *Mediasi Dalam Perspektif Hukum Syari'ah, Hukum Adat, dan Hukum Nasional*, Jakarta: Kencana, 2009.
- Ashshofa, Burhan, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Asshiddiqie, Jimly, *Perihal Undang-Undang*, Depok: Rajawali Pers, 2017.
- Busro, Muhammad, *Teori-teori Manajemen Sumber Daya Manusia*, Jakarta: Prenada Media, 2008.
- Furchan, Arief, *Pengantar Penelitian Dalam Pendidikan*, Surabaya: Usaha Nasional, 1992
- Lauer, Robert H., *Perspektif Tentang Perubahan Sosial*, Jakarta: Rineka Cipta, 1993.
- Moloeng, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2004
- Nasikun, *Sistem Sosial Indonesia*, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 1993.
- Pickering, Peg, *How to Manage Conflict*, Jakarta: Esensi, 2006.
- Rifai, Ahmad, *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Setiadi, Elly M. dan Kolip, Usman, *Pengantar Sosiologi Pemahaman, Fakta dan Gejala Permasalahan Sosial: Teori, Aplikasi dan Pemecahannya*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011.
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, 1999
- _____, *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Rajawali Press, 1992.

Sulaiman, King Faisal, *Teori Peraturan Perundang-undangan dan Aspek Pengujiannya*, Yogyakarta, Thafa Media, 2017.

Toyib, Yusid Dan Nugroho, Riant, *Transformasi Public Private Partnership Indonesia, Urgensi PPP Dalam Penyediaan Infrastruktur Indonesia*, Jakarta; PT. Elex Media Komputindo, 2018.

Veeger, Karel J., *Pengantar Sosiologi*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama-APTIK, 1997.

Waluyo, Bambang, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Jakarta: Sinar Grafika, 2002.

Widjaja, Gunawan, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001.

Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1960 Tentang Peraturan Pokok-Pokok Agraria (Termasuk Lembaran Negara Nomor 104 Tahun 1960)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 70) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 4297)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2009) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956)

Undang Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82) (Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234) Sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Undang Undang Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22)

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1963 Tentang Penunjukan Badan-Badan Hukum Yang Dapat Mempunyai Hak Milik Atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1963 Nomor 61) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2555)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 116) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4555) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2016 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2005 Tentang Tata Cara Penyertaan dan Penatausahaan Modal Negara Pada Badan Usaha Milik Negara dan Perseroan Terbatas

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2012 Tentang Pembangunan dan Pelestarian Lingkungan Hidup Bandar Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 71).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 Tentang Pengelolaan

Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 15) (Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6617)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2021 Tentang Hak

Pengelolaan, Hak Atas Tanah, Satuan Rumah Susun, dan Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 28)

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2021 Tentang

Penyelenggaraan Bidang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 42)

Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 2015 Tentang Kerja sama

Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 62).

Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 58 Tahun 2018 Tentang Tata Cara

Pelaksanaan Kerja Sama Pemerintah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Transportasi Di Lingkungan Kementerian Perhubungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 885).

Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2019 Tentang

Tatanan Kebandarudaraan Nasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 594) (Selanjutnya disingkat dengan PM 39 Tahun 2019).

Keputusan Menteri Perhubungan Nomor KM 28 Tahun 2020 Tentang Penetapan

Lokasi Bandar Udara Baru di Kabupaten Kediri Provinsi Jawa Timur

Peraturan Direktur Jenderal Perhubungan Udara Nomor 326 Tahun 2019 Tentang

Standar Teknis dan Operasional Peraturan Keselamatan Penerbangan Sipil-

Bagian 139 (*Manual of Standard CASR-Part 139*) Volume I Bandar udara)

Artikel, Jurnal dan Penelitian

Lailam, Tanto, “*Konstruksi Pertentangan Norma Hukum dalam Skema Pengujian*

Undang-Undang”, Jurnal Konstitusi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, Yogyakarta, Volume 11 Nomor 1, Maret 2014.

Mulyadi, Mohammad, “*Implementasi Kebijakan Pengadaan tanah Untuk*

Kepentingan Umum di Jakarta Utara”, Jurnal Pusat Penelitian Badan Keahlian DPR RI, Desember 2017.

Ratu, Harun dan Suhadi, Nainuri, “*Kajian Hukum Terhadap Pembebasan Lahan untuk*

Pembangunan Fly Over di Kota Samarinda ditinjau dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum”, Jurnal Ilmiah Hukum Volume 7 Nomor 39, Oktober 2017.

Ekasetya, Muhammad Paurindra, “*Pelaksanaan Pengadaan Tanah bagi*

Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Studi Analisis pada Pembangunan Jalan Tol Trans Jawa di Kabupaten Brebes)” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Negeri Semarang, 2015.

Kaur, Sumita, “*Aspek Hukum Peran Kerja sama Pemerintah Dengan Badan Usaha*

(KPBU) Dalam Mendorong Penyediaan Pembangunan Infrastruktur Di Kota

Pekanbaru”, Skripsi, Departemen Hukum Ekonomi, Fakultas Hukum
Universitas Sumatera Utara, 2018

Rae, Deystia Ayesha, “*Hak Untuk Menyamai Penawaran Terbaik Right To Match
Dalam Proyek Kerja sama Pemerintah dengan Badan Usaha (KPBU) Yang
Diprakarsai Badan Usaha*” Skripsi, Fakultas Hukum Universitas Indonesia,
2017.

Modul dan Paparan

Pusdiklat SDA dan Konstruksi Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia
Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, *Modul 1 : Peraturan
Perundang-Undangan dan Kebijakan Terkait Pembiayaan Infrastruktur*,
Jakarta, 2017

Direktorat Kerja sama Pemerintah Swasta dan Rancang Bangun, *Peran Kementerian
PPN/Bappenas dalam Proyek KPBU Dalam Penyediaan Infrastruktur*, Jakarta,
Paparan Kementerian PPN/Bappenas, 2020

Badan Pusat Statistik Kabupaten Kediri, *Kabupaten Kediri Dalam Angka Kediri
Regency in Figures 2021*, Kediri, 2021

Badan Pusat Statistik Kota Kediri, *Kota Kediri Dalam Angka, Kediri Municipality in
Figures 2021*, Kediri, 2021